

The Influence of The City of God on Calvin's Concept of Church and State

Dr. Tjahyadi Chandra, M.Th. D.Th.

Dr. Yonas PAP, M.Th., D.Th.

ABSTRACT

The significance of John Calvin for modern times is clearly expressed in these words: "The sixteenth century was an extraordinary century". Of all the people who made this century great, only Calvin has made broad contributions to the wider country. Calvinism is the name given to the system of thought that was revealed to us by John Calvin. He is recognized as the main initiator of this system, even though he is not the creator of the ideas contained in it. Calvin's theological views, along with other great leaders of the Protestant Reformation (Augustine and Martin Luther), are known as the rise of Augustinianism, which in turn is the same as the revival of the teachings of the Apostle Paul. But it was Calvin who first presented the basics of this view for modern times, in the systematic form and with the special application that we know from his time as Calvinism. Calvinism does not limit itself to theology; Calvinism is a comprehensive system of thought, which includes views on politics, society, science, and art, in addition to theology. A Calvinist tries to apply the truth of the Scriptures. Calvinism does not stop at the church structure, but extends within one system of life, and Calvinism elevates Christianity to the highest spiritual beauty; Calvinism created the church structure, which was a prerequisite for the confederate state; Calvinism developed a political scheme, which gave birth to constitutional government, both in Europe and in America; Calvinism promotes holiness through high moral standards in our social environment. Calvinism places under Church and State, under society and household circles, a strict philosophical conception. This dissertation is written in a qualitative method, "analyzing the data collected in the study, the main findings resulting from the data analysis". Qualitative research usually uses descriptive methods such as observation, data study, using data that can be analyzed through data or literature studies. This dissertation is written from the background of John Calvin's life, his conversion, even since he was a child, Calvin was happy to study law. The author explains the historical context of the institute, as well as the influence of the concept of civil government from Augustine (City of God) and Martin Luther (Two Kingdoms); the explanation is continued with the concept of civil government according to John Calvin, through the principles of government, also explains Calvin's ideas in relation to theocracy.

Keywords: Protestant Reformation; City Of God; The Principles Of Government; Theocracy; Calvinism; Pemerintahan Sipil, Negara dan Gereja, Two Kingdoms.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Calvin mengingatkan kita bahwa jika kita berada dalam situasi di mana undang-undang atau pemerintah atau mereka yang memegang kendali mengharuskan melakukan sesuatu yang jelas-jelas bertentangan dengan Firman Tuhan, tidak boleh berkompromi, tidak boleh gemetar ketakutan, tidak boleh menyerah. Namun sebaliknya, harus menyadari bahwa diharuskan untuk taat kepada Tuhan. Hubungan antara gereja dan negara mempunyai sejarah yang panjang dan rumit. Calvin, sebagai pemimpin di Jenewa. Calvin memulai dengan menyatakan bahwa bab 4 pasal 20 ini adalah tempat untuk mengatakan tentang pemerintahan yang "... hanya berkaitan dengan penegakkan keadilan sipil dan

moralitas lahiriah ...”¹ Calvin percaya bahwa Tuhan telah menetapkan suatu tatanan manusia harus mengatur kehidupan sipilnya sehingga kesalehan (iman yang sejati) dapat berkembang. Calvin ingin memperjelas bahwa kekuasaan sekuler dan kekuasaan spiritual, “... adalah dua hal yang sangat berbeda”² dan bahwa “... kebebasan spiritual bisa ada bersamaan dengan perbudakan sipil”.³ Dengan kata lain, umat Kristiani dapat hidup “bebas” di bawah hukum masyarakat sipil sehingga tidak diperlukan teokrasi, di mana gereja menjalankan negara.

Sistem ini bersifat campuran di mana negara menegakkan hukum yang melindungi kehidupan dan kebebasan masyarakat, dan pada saat yang sama “... mencegah timbulnya penyembahan berhala, penistaan terhadap Tuhan, penistaan terhadap kebenaran-Nya dan pelanggaran publik lainnya terhadap agama”, dan menyebar di antara orang-orang”⁴ pemerintahan sipil kewajiban untuk menegakkan agama dengan benar ...”⁵ Namun Calvin ingin memperjelas bahwa dia tidak memberikan “... kepada pemerintahan sipil kewajiban untuk menegakkan agama dengan benar...”⁶

Calvin percaya bahwa pemerintah harus melindungi agama dan moral masyarakat, dan bahwa semua pemerintahan adalah perintah Tuhan. Ia membuat hal ini menjadi jelas ketika ia menyatakan bahwa “... mereka tidak hanya menolak hukum tetapi juga menolak Tuhan agar Dia tidak memerintah mereka”.⁷ Calvin melanjutkan dengan menyatakan bahwa penguasa adalah “... mentahbiskan pelindung dan pembela kesopanan, dan ketenangan masyarakat, dan bahwa satu-satunya upaya mereka adalah memberikan keselamatan dan kedamaian bersama bagi semua orang”.⁸

Bagi Calvin, memberikan keselamatan bagi semua orang, termasuk hak untuk menjatuhkan hukuman mati dan membela orang yang tidak bersalah, “Pemberi hukum sendiri meletakkan pedang ke tangan para menterinya ... untuk membalas, atas perintah Tuhan, penderitaan orang-orang saleh (dalam hal ini penderitaan pembunuhan)”⁹ dan “haruskah mereka (para hakim) menyarungkan pedang mereka ... sementara manusia dengan kejam membantai dan membantai, mereka akan menjadi bersalah karena ketidaksopanan yang besar”.¹⁰ Calvin merangkumnya sebagai berikut: “Namun hakim perlu memperhatikan keduanya, jangan sampai dengan kekerasan yang berlebihan ia lebih banyak merugikan daripada menyembuhkan; atau, karena ... kasih sayang atas pengampunan, jatuh ke dalam kelembutan yang paling kejam...”¹¹

¹*Institutio*, IIV, 20 1485.

²*Institutio*, IV, 20, 1486.

³*Institutio*, IV, 20, 1486.

⁴*Institutio*, IV, 20, 1488.

⁵*Institutio*, IV, 20, 1488.

⁶*Institutio*, IV, 20, 1488.

⁷*Institutio*, IV, 20, 1492.

⁸*Institutio*, IV, 20, 1496.

⁹*Institutio*, IV, 20, 1497.

¹⁰*Institutio*, IV, 20, 1498.

¹¹*Institutio*, IV, 20, 1499.

Hukum peradilan yang, "... diberikan kepada pemerintahan sipil, memberikan rumusan tertentu mengenai kesetaraan dan keadilan yang dengannya mereka dapat hidup bersama tanpa cela dan damai".¹² Pemahaman Calvin tentang hukum adalah bahwa negara-negara bebas membuat perangkat hukum mereka sendiri selama hukum tersebut "mencerminkan hukum cinta".¹³ Calvin membahas konsep hukum dan keadilan. Calvin percaya bahwa semua undang-undang harus "mendorong tujuan yang sama, yaitu keadilan ... oleh karena itu keadilan saja harus menjadi tujuan, aturan, dan batasan dari semua undang-undang".¹⁴

Calvin mencatat bahwa meskipun Alkitab tampaknya melarang orang Kristen untuk pergi ke pengadilan, rasul Paulus "... dengan jelas memberikan kesaksian yang sebaliknya bahwa hakim adalah pelayan Allah demi kebaikan kita" (Roma 13:4). Dengan ini kita memahami bahwa dia telah ditahbiskan oleh Tuhan, sehingga dilindungi oleh tangannya ... melawan kesalahan dan ketidakadilan orang jahat, dapat menjalani kehidupan yang tenang dan tenteram".¹⁵ Calvin berbicara tentang rasa hormat terhadap orang-orang yang mempunyai otoritas bahwa semua orang yang berkuasa telah ditempatkan di sana oleh Tuhan, dan oleh karena itu manusia harus "... menghargai dan menghormati mereka sebagai pelayan dan wakil Tuhan".¹⁶ Orang Kristen harus menaati penguasa. Rasa hormat dan kepatuhan menurut Calvin, tidak memungkinkan orang terlibat secara politik dalam mencari jabatan. Sebaliknya, masyarakat seharusnya menunggu pihak berwenang untuk memanggil mereka ke jabatan yang lebih tinggi. Ketaatan bahkan seharusnya ditawarkan kepada hakim yang tidak adil. "Kita tidak hanya tunduk pada wewenang para pangeran yang menjalankan tugas mereka terhadap kita dengan jujur ... tetapi juga pada wewenang semua orang yang ... memiliki kendali atas segala urusan, meskipun mereka tidak menjalankan sedikit pun jabatan pangeran".¹⁷ Ketaatan ini bukan hanya disebabkan karena Tuhan menempatkan semua hakim pada posisi kekuasaan, namun karena Tuhan menggunakan para hakim yang tidak adil itu untuk menghukum manusia karena dosa-dosa mereka.

Menurut Calvin, tugas pemerintah sipil ialah mendukung dan melindungi penyembahan kepada Allah dari sudut lahiriah, mempertahankan ajaran yang sehat tentang agama dan membela kedudukan gereja, mengatur kehidupan dengan berpedoman pada pergaulan masyarakat, membina kesusilaan sesuai dengan keadilan seperti yang ditetapkan oleh undang-undang negara, menumbuhkan dan memupuk perdamaian serta ketentraman umum.

Jadi, bagi Calvin pemerintahan menyatakan ketaatannya kepada Allah terutama kesetiaannya dalam pelaksanaan tugas yang diberikan Allah kepadanya. Karena tugas menjadikan warga masyarakat yang baik adalah tugas Gereja, yang harus didukung oleh pemerintah tetapi tidak boleh diambil alih.

¹²*Institutio*, IV, 20, 1503.

¹³*Institutio*, IV, 20, 1503.

¹⁴*Institutio*, IV, 20, 1504.

¹⁵*Institutio*, IV, 20, 1506.

¹⁶*Institutio*, IV, 20, 1510.

¹⁷*Institutio*, IV, 20, 1512.

Pemerintah perlu bahkan merupakan anugerah Allah untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Menurut Calvin, orang yang meniadakan pemerintah dan negara tidak memahami keadaan dunia, yang masih dikuasai oleh dosa. Mereka juga tidak menghargai apa yang dibuat Allah untuk melindungi orang baik terhadap yang jahat.

Hubungan gereja dan negara dalam teologi Calvin sangat erat dan dapat disimpulkan bahwa kedua lembaga ini saling berdampingan untuk melaksanakan kehendak Allah dan mempertahankan kehormatannya. Namun bukan dalam arti Negara boleh saja mengambil alih semua apa yang menjadi bagian gereja, dan juga sebaliknya. Hal ini disebabkan oleh karena Calvin yang mencita-citakan suatu pemerintah yang teokrasi.

Dalam kasus Gereja-Negara, Negara mendominasi Gereja, sehingga segala sesuatu yang berlaku di dalam Gereja ditentukan oleh Negara. Pada pihak lain, kasus Negara-Gereja adalah kecenderungan yang sebaliknya. Gereja mendominasi kehidupan bernegara. Norma-norma yang berlaku dalam masyarakat diatur oleh Gereja. Di dalam pembentukan negara-negara modern, orang mencoba merumuskan model hubungan Gereja-Negara dengan sebaik-baiknya. Gereja-Negara hendaknya menjadi partner dalam mencapai tujuan untuk kesejahteraan semua umat manusia, tidak berusaha untuk saling mendominasi.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimanakah Pengaruh Pandangan Teologi Calvin Tentang Bagaimanakah pengaruh Augustinus (*city of God*) dan Martin Luther (*two kingdoms*) dalam konsep Calvin tentang Pemerintahan Sipil dan Gereja ?

1.3. Batasan Masalah

Bagaimanakah Pengaruh Pandangan Teologi Calvin Tentang Pemerintahan Sipil & Gereja Menurut Buku *Institutio* Kitab IV, Bab 20 ?

1.4. Asumsi Penelitian

Jika gagasan penulisan *Institutio* Calvin telah dipengaruhi oleh pandangan dari Agustinus dan Martin Luther maka peran Calvin dalam dunia politik maupun dunia teologi mempunyai pengaruh yang besar.

1.5. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian:

Menelusuri gagasan pemerintahan sipil yang ada di dalam buku *Institutio* Kitab IV, Bab 20.

Manfaat Penelitian:

Aspek teoritis. Penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan dan memperkaya kajian teoritis terhadap latar belakang kehidupan Calvin, gagasan konsep Gereja dan Negara sebagai akibat dari pengaruh *City of God* dari Augustinus dan *Two Kingdoms* dari Martin Luther.

1.6. Metodologi Penelitian Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metodologi penelitian ini, menggunakan penelitian kepustakaan dengan *pendekatan kualitatif*.¹⁸ Penelitian kualitatif biasanya menggunakan *metode deskriptif* seperti observasi, wawancara, dan studi kasus untuk menggambarkan perilaku daripada menggunakan data yang bisa dianalisis secara statistik.

Dalam pandangan penelitian kualitatif, gejala itu bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan), sehingga peneliti kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*) dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.¹⁹

Peneliti kualitatif dituntut mampu mengorganisasikan semua teori yang dibaca. Landasan teori yang dituliskan dalam proposal penelitian lebih berfungsi untuk menunjukkan seberapa jauh peneliti memiliki teori dan memahami permasalahan yang diteliti walaupun masalah tersebut bersifat sementara itu. Oleh karena itu landasan teori yang dikemukakan tidak merupakan harga mati, tetapi bersifat sementara. Peneliti kualitatif justru dituntut untuk melakukan *grounded research*, yaitu menemukan teori berdasarkan data yang diperoleh di lapangan atau situasi sosial.²⁰

Sejarah yang akan kita bahas adalah tokoh utamanya adalah Calvin, yang bukunya adalah *Institutio*, khususnya Bab. IV, pasal 20, tentang Pemerintahan Sipil. Calvin telah dicirikan sebagai tokoh dengan satu buku dan buku yang satu itu adalah *Institutes* edisi tahun 1559. *Institutio* harus dibaca di dalam terang tafsiran-tafsiran Calvin dan hal sebaliknya juga benar. Sang pakar dogmatika, sang ekseget, dan sang hamba Tuhan adalah pribadi yang satu dan sama di dalam diri Calvin sendiri.²¹

Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah kepustakaan atau buku-buku dan wawancara yang menunjang pembahasan ini. Dokumentasi jika diperlukan dan observasi dilakukan sehubungan dengan pengaruh gagasan teologis Calvin terhadap Negara dan Pemerintahan masa kini.

¹⁸Burton, L.J., *An Interactive Approach To Writing Essays And Research Reports In Psychology*. Milton, Queensland: John Wiley and Sons Australia, Ltd., 71.

¹⁹Ibid., 207.

²⁰Ibid.

²¹Herman J. Selderhuis, *Buku Pegangan Calvin*, Surabaya: Penerbit Momentum, 2017, 262.

BAB II

PENGARUH KONSEP PEMERINTAHAN SIPIL TERHADAP CALVIN

2.1. *The City of God (Augustinus), DE CIVITATE DEI*²²

Karya *The City of God*, yang berisi pemikiran Augustinus mengenai Negara dan kekuasaan adalah sebuah produk interaksi-dialektis antara dirinya dengan realitas sosio-politik yang mengitarinya. Karya itu merupakan *Civitate Dei*, pandangan Augustinus tentang asal muasal masyarakat politik, hubungan pemerintahan sipil dengan hukum Taurat, hukum alam dan keadilan; persyaratan kualitas seorang penguasa Negara dan kaum oposisi penguasa tiran serta sikap orang-orang Kristen terhadap perbudakan dan kemiskinan.²³ *The City of God*, karya jenius terbesar diantara para Bapa Latin dan paling dikenal dan paling banyak yang dibaca dari karya-karyanya, kecuali “*The Confessions*” ini mewujudkan hasil dari tiga belas tahun kerja intelektual dan penelitian (AD 413-426). Ini adalah pembenaran Kristen terhadap serangan dari orang kafir dalam pandangan penghancuran kota Roma oleh kaum barbar, pada suatu waktu ketika peradaban Yunani-Romawi kuno mendekati kejatuhannya, dan seorang Kristen baru peradaban mulai meningkat di atas reruntuhannya. Ini adalah upaya pertama pada filsafat sejarah, di bawah aspek dua kota rival atau komunitas, “*The City of God*” yang kekal dan kota binasa, dari dunia.²⁴

2.2. IKHTISAR BUKU *De Civitate Dei*,

Sepuluh buku pertama dari *The City of God*, yang membentuk bagian pertama dari pekerjaan, membantah tuduhan orang-orang kafir ‘bahwa orang

²²Pikiran Augustinus tentang relasi Gereja dengan Negara dipaparkan Augustinus dalam kitabnya yang besar dan sangat masyhur, yakni **Kota Allah**. Kitabnya ditulis sebagai apologia untuk membela Gereja. Di dalamnya ia menggambarkan *kedua kerajaan besar* itu, yang semata-mata bertentangan satu sama lain kerajaan sorga dan kerajaan bumi, atau kerajaan Tuhan dan kerajaan iblis, terang dan kegelapan, kerendahan dan kecongkakan, kesucian dan kedurhakaan. Kerajaan yang pertama Nampak di dalam Gereja Kristen dan kerajaan yang kedua dalam kerajaan-kerajaan dunia ini, teristimewa dalam kekaisaran Romawi. Segala kerajaan ini yang berdasarkan dosa dan cinta diri dan yang tak lain dari “gerombolan perampok” saja, harus binasa satu persatu, tetapi kerajaan Tuhan atau Negara Allah tak dapat diruntuhkan. H. Berkhof & I.H. Enklaar, **Sejarah Gereja**, 70. Pengaruh Augustinus nanti kita temui di mana-mana dalam sejarah Gereja pada abad-abad yang berikut, bahkan sampai ke dalam theologia Luther dan Calvin. Ibid., 71.

²³Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan kekuasaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001, 74.

²⁴Schaff, Philip, 1890, *St. Augustine's City of God and Christian Doctrine*. New York: Grand Rapids, MI: Christian Classics Ethereal Library. 3. Diakses dari laman http://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/1819-1893,_Schaff,_Philip,_2_Vol_02_The_City_Of_God._Christian_Doctrine,_EN.pdf. Pada 15 Juni 2016.

Kristen membawa jatuhnya Roma. Kejatuhan kota Roma membawa dampak luar biasa bagi Imperium Romawi.²⁵

2.3. Penjelasan *De Civitate Dei*

Augustinus juga mengajukan argumentasi teologis dalam menjelaskan kejatuhan Roma. Kejatuhan Roma memiliki basis teologis dalam sejarah. Berdasarkan kajiannya atas kisah-kisah dalam Perjanjian Baru (*The New Testament*) Augustinus berpendapat bahwa cikal-bakal kejatuhan itu telah ada jauh sebelum imperium Romawi terbentuk, yaitu dengan terjadinya kejatuhan Adam – manusia pertama dan nenek moyang segala bangsa – dari surga. Adamlah yang telah memulai kejatuhan itu. Dan ironisnya, ia kemudian diwariskan kepada anak cucunya di kemudian hari. Akibatnya, anak cucunya mengalami kejatuhan serupa seperti yang dialami Adam.²⁶ Augustinus menciptakan teologi diri di *The Confessions*, dan di *The City of God* ia memulai teologi sejarah. Dia mengungkapkan penjelasan luas sejarah yang dimulai dengan penciptaan itu sendiri, bergerak melalui gejolak dan pergolakan negara buatan manusia (Kota Dunia), dan terus realisasi Kerajaan Allah (Kota Allah). Akibatnya, *The City of God* adalah penyelesaian proyek ia mulai di *The Confessions*, di mana ia menelusuri kemajuan diri terhadap penyelesaian pada Tuhan. Demikian juga, masyarakat manusia menemukan penyelesaian diarah Allah. Seiring dengan teologi sejarah, Augustinus berusaha untuk mengumpulkan filsafat Kristen dari masyarakat. Dengan kata lain, ia memberikan berbagai bidang penyelidikan filosofis, seperti etika dan politik, satu kesatuan dalam universalitas wahyu ilahi. Sejarah melengkapi dirinya dalam hukum Tuhan. Para filsuf dari masa lalu, seperti Plato, semua telah mengatakan bahwa seseorang tidak berutang kesetiaan penuh dan mutlak untuk setiap masyarakat duniawi, dan Augustinus ketat mengkritik konsep ini dalam terang ajaran Kristen. Dia menyatakan bahwa Kitab Suci saja dapat menginstruksikan manusia tentang kebaikan tertinggi dan kejahatan tertinggi dan bahwa tanpa bimbingan ini, usaha manusia tidak memiliki tujuan.

Augustinus menyajikan empat elemen penting dari filosofi di *The City of God*: gereja, negara, kota Surga, dan kota dunia. Gereja ilahi didirikan dan mengarah manusia untuk kebaikan kekal, yang adalah Allah. Negara menganut nilai politik dan pikiran, merumuskan sebuah komunitas politik.

The City of God merefleksikan konflik dalam diri Augustinus sendiri serta dalam diri masyarakatnya, antara nilai-nilai kebudayaan lama dengan pandangan kristen baru. Pada akhirnya orang Galilea menaklukkan orang Romawi, setidaknya pada suatu waktu. Augustinus menyebut dirinya sebagai orang Romawi terakhir. Untuk kalangan Kristen Barat, Augustinus tak diragukan lagi merupakan salah satu di antara orang pertama dan terbesar di

²⁵ Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan kekuasaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001, 74.

²⁶ Ahmad Suhelmi. 2001. Ibid., 74.

Katolik,²⁷ juga memengaruhi sejarah teologia, hingga sampai ke konsep teologia Luther dan Calvin.²⁸

2.4. “Pengaruh ”*The City Of God* terhadap konsep Calvin tentang Gereja dan Negara

Augustinus yang memengaruhi teologia Calvin, seperti dosa asal (dosa warisan), predestinasi, kedaulatan Allah, kehendak bebas manusia, juga kota Allah, tetapi Calvin mempunyai konsep teologi yang agak berbeda dengan konsep teologi Augustinus. Di sini penulis mau mendiskusikan tentang konsep Kota Allah (*City of God*) antara teologi Augustinus dengan teologi Calvin. Tetapi yang penulis lihat ada perbedaan konsep antara Augustinus dan Calvin, karena ada perbedaan konteks dimana latar belakang mereka berbeda. Augustinus menghadapi konteks Negara Roma yang hancur, lalu pemerintahan menuduh orang Kristen sebagai penyebabnya, karena pemerintah Roma menganggap dewa/i mereka marah sehingga Negara Roma dihancurkan. Akhirnya, Augustinus menjelaskan apologia melalui buku kota Allah, yang ditulis selama belasan tahun berjumlah 800 halaman, dengan menjelaskan alasan-alasan mengapa Roma hancur dengan penjelasan dari Alkitab, dan ia menjelaskan tentang dosa asal dari Adam sampai manusia masa kini.

Sedangkan konteks Calvin adalah pada abad pertengahan²⁹ menghadapi kesesatan dari Gereja Roma Katolik (GRK), ia melihat kemerosotan GRK yang terlalu menekankan usaha manusia dalam menyelamatkan dirinya, juga organisasi kepausan yang tidak mengikuti ajaran Alkitab, bahkan Kitab Suci tidak dijadikan pedoman hidup.

Dalam *Institutio*, John Calvin menjelaskan tentang konsep pemerintahan sipil, yang menyatakan bahwa dalam kehidupan manusia ada dua pemerintahan³⁰, pemerintah yang kesatu, letaknya di dalam jiwa atau batin manusia dan yang menyangkut kehidupan kekal.³¹ Pemerintah yang kedua,

²⁷Nina H. Lubis. 2003. *Historiografi Barat*. Bandung: CV Satya Historika. 46.

²⁸H. Berkhof & I. H. Enklaar, *Sejarah Gereja*, 71.

²⁹Teologia abad-abad pertengahan ini, yang diusahakan di sekolah-sekolah tinggi atau universitas itu, biasanya dinamai “*skolastik*”. Pokok teologia baru ini telah ditetapkan oleh tradisi Gereja. Jadi maksud scholastic tidak lain daripada memikirkan kembali isi teologia yang diwarisinya dari waktu dahulu. Ahli-ahli scholastic berkeyakinan bahwa segala ajaran Gereja itu bukan saja harus dipercaya, tetapi dapat dimengerti juga oleh manusia. Sebab itu mereka berusaha, untuk membuktikan bahwa segala sesuatu yang telah dinyatakan Allah dapat diterangkan dan dibenarkan terhadap akal budi manusia. Dengan demikian soal yang terutama yang dipikirkan dan dirundingkan oleh scholastic, ialah: *bagaimanakah relasi antara pernyataan (wahyu) Tuhan dengan akal budi manusia?* Untuk mengerti pernyataan Tuhan dipakainya teologia Augustinus, dan untuk melatih dirinya dalam hal berpikir menurut ilmu filsafat dipergunakannya kitab “*Logika*”, karangan Aristoteles, ahli filsafat Yunani yang mahsyur itu, karena pada abad ke-XI itu hanyalah kitab Aristoteles ini saja yang dikenal di barat. H. Berkhof & I. H. Enklaar, *Sejarah Gereja*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1997, 102.

³⁰Calvin, *Institutio*, XX, 252.

³¹Ibid.

yang hanya menetapkan tata-kehidupan yang benar dari segi sipil serta lahiriah.³²

Jadi, konsep Augustinus agak berlainan dengan konsep Calvin, kalau konsep Augustinus, Kota Allah lebih menekankan teologia kontras, antara Kerajaan Allah dan kerajaan iblis; yang gelap dan terang; yang jahat dan baik, sedangkan konsep Calvin, lebih menekankan antara batin dan lahiriah.

Tetapi, di antara perbedaan juga ada persamaan, yaitu konsep kota Allah, yaitu Kerajaan Allah yang kekal, yang hanya diperoleh melalui Tuhan Yesus Kristus, karena sifat Kerajaan Allah itu kekal adanya, sedangkan kerajaan dunia itu, mengalami penurunan dan makin lama makin menyusut dan akhirnya tidak ada.

2.5. Perbandingan konsep Gereja dan Negara antara Augustinus dan Calvin³³

Pikirannya tentang relasi Gereja dengan Negara dipaparkan Augustinus dalam kitabnya yang besar dan sangat masyhur, yakni “kota”³⁴ Allah” (*De Civitate Dei*). Sebab-musababnya ia mulai mengarang kitab ini ialah Gereja sangat dipersalahkan oleh orang kafir pada waktu itu. Kata mereka: “yang menyebabkan negara Romawi telah runtuh dan kota Roma dikalahkan oleh musuh (yaitu oleh Alarik, raja bangsa Got Barat pada tahun 410), tak lain daripada agama Kristen, yang sudah menghalaukan dewa-dewa Negara. Sekarang dewa-dewa itu menghukum mereka sekalian”.

Augustinus menolak segala serangan ini. Kitabnya yang tersebut tadi ditulisnya sebagai apologia untuk membela Gereja. Di dalamnya ia menggambarkan *kedua kerajaan* besar itu, yang semata-mata bertentangan satu sama lain kerajaan sorga dan kerajaan bumi, atau kerajaan Tuhan dan kerajaan iblis, terang dan kegelapan, kerendahan dan kecongkakan, kesucian dan kedurhakaan. Kerajaan yang pertama nampak didalam Gereja Kristen dan kerajaan yang kedua dalam kerajaan-kerajaan dunia ini, teristimewa dalam kekaisaran Romawi. Segala kerajaan ini yang berdasarkan dosa dan cinta diri, dan yang tak lain dari “gerombolan perampok” saja, harus binasa satu persatu; tetapi kerajaan Tuhan atau kota³⁵ Allah tak dapat diruntuhkan. Warga kerajaan itu adalah orang-orang musafir, yang berjalan ke sorga, tanah airnya, tempat keselamatan yang kekal. *Akan tetapi kerajaan dunia dapat berguna*

³²Ibid.

³³H. Berkhof & I.H. Enklaar, *Sejarah Gereja*, 70-71.

³⁴“Kota” digunakan untuk menggantikan tempat “kerajaan” dalam kitab-kitab Injil dan, agaknya, kata ini kaya akan nuansa simbolis. Kata itu mengingatkan kita akan Kota Surgawi atau Yerusalem Baru dalam Kitab Wahyu, yang dipertentangkan oleh Augustinus dengan Kota Duniawi, yang dicontohkannya dengan Roma dan Babilon. Linwood Urban, *Sejarah Ringkas Pemikiran Kristen*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012, 437.

³⁵Dalam pandangan Augustinus, Kota Allah itu berisi mereka yang mengabdikan kepada Allah dan kehendak-Nya bagi dunia. Karena Gereja di bumi ini diciptakan demi pelayanan bagi Allah dan berisikan begitu banyak murid yang setia, Gereja menjadi suatu bagian, hanya satu bagian, dari persemakmuran yang lebih besar dan lebih mulia, Kota Surgawi, Linwood Urban, *Sejarah Ringkas Pemikiran Kristen*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012, 437.

*juga, yaitu jikalau Negara dunia itu mau melayani Gereja*³⁶, sambil memelihara kebenaran dan keamanan di bumi ini seberapa mungkin. Hal ini boleh diharapkan daripadanya apabila Negara menaklukkan dirinya kepada agama yang benar. Pada abad pertengahan Paus-paus memakai pandangan-pandangan Augustinus ini sebagai dasar tuntutan untuk memerintah kaisar dan Negara.

2.6. Konsep Calvin tentang Gereja dan Pemerintah³⁷

Calvin menaruh minat istimewa terhadap soal relevan Gereja dan pemerintah. Dialah yang pertama di antara para pembaharu (*Reformator*) Gereja yang membedakan kedua kuasa itu dengan tegas.

Calvin menuntut kebebasan Gereja sepenuhnya dari Negara, berdasarkan hubungan mutlak antara Gereja dan Tuhannya. Tetapi justru karena ia tahu memisahkan kuasa Gereja dari kuasa negara, ia juga dapat menghubungkannya. Sebab pemerintah pun wajib takluk kepada pemerintahan Allah, yang diberitakan oleh Gereja. Bukankah Taurat Tuhan mau menguasai segenap hidup masyarakat? Hal itu tidak berarti bahwa Gereja harus memerintah Negara, tetapi pemerintah negeri wajib juga melindungi dan memajukan Gereja yang benar, sambil mencegah dan memerangi agama yang palsu. Di samping itu pemerintah harus melakukan tugasnya di lapangannya sendiri dengan menjalankan keadilan dan menjamin kehidupan yang aman dan makmur bagi semua penduduk negeri. Dengan demikian dalam praktek pemerintah acapkali menjadi pelayan Gereja, seperti di Jerman pada masa Calvin. Namun, Gereja harus berhati-hati supaya ia jangan terlanjur dalam tuntutannya terhadap Negara, karena soal “Negara-Gereja” juga tidak cocok dengan teokrasi yang sebenarnya.

KESIMPULAN

Bagi Augustinus, satu kota dunia diorganisasi di seputar kegagahan dan kesombongan manusia, lengkap dengan materialisme, kekejaman, ketidakpercayaan, nafsu akan kekuasaan dan penindasan; sebaliknya, *civitatis Dei* bercirikan kasih yang mendalam akan Allah, lebih menghargai yang kekal daripada yang sementara, standar etika yang tinggi, dan perlakuan yang adil terhadap sesama. Sebagai seorang yang sangat mempercayai kebobrokan manusia dan keterbatasan kebaikan manusia, Augustinus melihat perlunya

³⁶ Pada masa James dari Viterbo (wafat: 1308), ide bahwa Gereja adalah kerajaan yang kelihatan telah terbentuk dengan tegas. Judul karyanya, *Christian Government*, yang terkadang dipercaya sebagai risalah terpisah pertama mengenai Gereja, cukup banyak mengindikasikan tentang hal itu. Pembenahan kembali yang terjadi selama abad ke-12 atas bagian yang penting dari Hukum Romawi, termuat dalam *Corpus Juris Civilis* dari Yustinianus, yang melanjutkan proses ini. Perundang-undangan ini berisi konsep dan contoh untuk mengorganisasikan dan memberikan dasar bagi struktur jabatan di dalam gereja. Secara bertahap gereja terlihat semakin menyerupai suatu Negara. Ewart Lewis, *Medieval Political Ideas*, Jilid 2, New York: Alfred A. Knopf, 1954, 358, dst.

³⁷ H. Berkhof & I. H. Enklaar, *Sejarah Gereja*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1997, 176-177.

pemerintahan sebagai suatu mekanisme pengendalian untuk masyarakat yang baik. Augustinus tidak mengharapkan pemikiran non-Kristen dapat menciptakan pemerintahan sipil yang baik, ataupun menghasilkan kebebasan: “Orang berdosa (sesungguhnya) membenci kesejajaran manusia di bawah Allah dan, seolah-olah ia adalah Allah, suka memaksakan kedaulatannya pada sesamanya. Ia membenci kedamaian Allah yang adil dan memilih kedamaiannya sendiri yang tidak adil. Akan tetapi, ia tidak berdaya untuk tidak mengasihi kedamaian semacam itu. Karena, tidak ada dosa manusia yang begitu tidak alamiah hingga dapat menghapuskan semua jejak apapun dari natur manusia”.³⁸

Buku Augustinus, *City of God*, merupakan suatu pembelaan iman (*apologi*) bagi gereja Kristen dan nilai-nilai etikanya. Dalam usaha menjawab para kritikus sekuler yang berusaha mengkambinghitamkan kejatuhan Kekaisaran Romawi kepada kepercayaan dan praktik Kristen (Roma jatuh waktu pemerintahan Honorarius, seorang kaisar Kristen), Augustinus berusaha keras untuk menunjukkan bahwa sebaliknya, benih kerusakan masyarakat justru terletak pada moral dan konsep kekafiran sebelum Roma menjadi Kristen. Bagi Augustinus, kejatuhan Roma merupakan bagian lain dalam penyingkapan *providensi* Allah—sebuah topik yang kemudian menjadi kekhasan Calvinistik.

Augustinus adalah seorang pionir dalam menegaskan bahwa kehendak Ilahi lebih fondasional dalam masalah manusia daripada pemerintahan manusia yang terbesar sekalipun. Menurut Augustinus (dan kemudian Calvin), “Hanya providensi Ilahilah yang dapat menjelaskan berdirinya kerajaan-kerajaan di antara manusia”.³⁹ Bahkan Kekaisaran Romawi tidak bangkit dan jatuh di luar kedaulatan Allah, dan orang-orang yang berusaha menjelaskan kebangkitan dan kejatuhan pemerintahan-pemerintahan dinasihati untuk tidak mengabaikan pekerjaan aktif dari kehendak providensi Allah atas bangsa-bangsa: “Allah tidak mengizinkan apa pun tetap tidak tertata dan Ia tahu segala sesuatu sebelum itu semua berlalu. Ia adalah Penyebab segala sesuatu, meskipun bukan dari semua pilihan”.⁴⁰

Berlawanan dengan gagasan bahwa pemerintahan manusia itu bersifat otonom (*independen*), Augustinus menegaskan bahwa Allah yang berdaulat membangkitkan dan meruntuhkan pemimpin-pemimpin, meskipun mereka mungkin bukan orang percaya. Tidak ada sesuatu pun yang lepas dari ketetapan-Nya.

Augustinus juga mengikuti ajaran Perjanjian Lama bahwa unit pemerintahan yang paling fundamental adalah rumah tangga: setiap rumah tangga seharusnya merupakan suatu permulaan atau unsur pokok yang terpisah-pisah dari suatu komunitas sipil”.⁴¹ Ia berbicara tentang tiga bidang

³⁸Augustine, *The City of God* (NewYork: Doubleday, 1958), 454.

³⁹Ibid., 99.

⁴⁰Ibid., 103.

⁴¹Ibid., 463.

utamadari pemerintahan sipil: “Pertama, kita memiliki rumah tangga;⁴² lalu kota; akhirnya dunia. Dan tentu saja sama seperti bahaya-bahaya di laut, semakin besar komunitas, semakin banyak kemalangannya”.⁴³ Ia juga memberikan suatu bentuk awal dari peniadaan legitimasi, jika seorang pemimpin menjadi tirani: “Tetapi jika pangeran itu tidak adil atau seorang tiran, atau jika para aristocrat itu tidak adil (dimana kelompok mereka sekadar suatu golongan), atau jika rakyat sendiri tidak adil (dan harus disebut, karena kurangnya sebutan yang lebih baik, seorang tiran juga), maka persemakmuran bukan hanya sekadar buruk...tetapi sama sekali bukan persemakmuran. Alasannya adalah sudah tidak ada lagi kesejahteraan [kemakmuran] rakyat, sekali seorang tiran atau suatu golongan merebutnya”.⁴⁴

Augustinus sangat memengaruhi teologi abad-abad berikutnya. Pengaruhnya pada Calvin sangat terkenal dan tidak boleh diremehkan. Sebelum zaman Aquinas, bahkan barangkali sebelum permulaan Reformasi, kebijaksanaan politik Augustinus merupakan paradigma yang dominan dalam konstruksi-konstruksi Abad Pertengahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Augustine, *The City of God*. (USA: Hendrickson Publishers, 2009), Inc., trans. by Marcus Dods.
- Battles, F. L. (trans), *Institution of the Christian Religion* (Atlanta, 1975) edition Berkhof H., & Enklaar I.H., *Sejarah Gereja* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1997).
- Battles, Ford Lewis, *Institutes of the Christian Religion Calvin*, edisi 1536, (Grand Rapids: Eerdmans, 1986).
- Calvini, Ioannis, *Institutio Religionis Christianae*, Basel, 1536, trans. John Calvin, *Institutes of the Christian Religion*, terj. Ford Lewis Battles, ed. rev. (Grand Rapids: Eerdmans, 1986).
- End, Th. Van den, *Harta Dalam Bejana*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1982).
- Gargill Thompson, W. D. J., *'The "Two Kingdoms" and the "Two dies in the Reformation: Luther to Hooker*, ed. C. W. Dugmore, (London, 1980).
- Hall, David W., *Penuntun Ke Dalam Theologi Institutes Calvin*, (Surabaya Momentum, 2009).
- Hopfl, Harro, *The Christian Polity of John Calvin*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1982).
- J. T. McNeill (ed.) and F. L. Battles (trans.), *Institutes of the Christian Religion*, Library of Christian Classics, vols 20 and 21, (Philadelphia, 1960).

⁴²D.J. McQueen, *The Origin and Dynamics of Society and the State According to St. Augustine*, *Augustinian Studies* 4 (1973): 85, menggambarkan keluarga sebagai seminarium civitatis menjadi tirani: “Tetapi jika pangeran itu tidak adil atau seorang tiran, atau jika para aristokrat itu tidak adil (dimana kelompok mereka sekadar suatu golongan), atau jika rakyat sendiri tidak adil (dan harus disebut, karena kurangnya sebutan yang lebih baik, seorang tiran juga), maka persemakmuran bukan hanya sekadar buruk...tetapi sama sekali bukan persemakmuran.

⁴³Augustine, *City of God*, 446.

⁴⁴Ibid., 74.

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND MANAGEMENT STUDIES (IJOSMAS)

Vol.6 No. 6

<https://www.ijosmas.org>

e-ISSN: 2775-0809

- Markus, R. A. (ed.), *Augustine*, (New York, 1972).
- Mangisi SE. Simorangkir, *Ajaran Dua Kerajaan Luther*, (Pematang siantar: kalportase pusat GKPI; 2008).
- McQueen, J., “*The Origin and Dynamics of Society and the State According to St. Augustine*”, (Augustinian Studies 4,1973).
- McGrath, Alister, E., *Sejarah Pemikiran Reformasi*, (Jakarta: BPK G.M., 1997).
- Meeter, H. Henry, *Pandangan-Pandangan Dasar Calvinisme*, (Surabaya: Penerbit Momentum, 2014).
- Moeller, B., *Imperial Cities and the Reformation*, trans. H.G. Midelfort & M.U. Edwards (Philadelphia, 1972).
- McNeill, John T. dan Ford Lewis Battles, ed. *John Calvin: Institutes of the Christian Religion*. (Philadelphia: Westminster Press, 1960).
- Niesel, W., *The Theology of Calvin*, trans. H. Knight, (London, 1956).
- Norton, T. (trans.), *Institution of the Christian Religion*, (London, 1561). the first translation into English.
- Situmorang, Jonar, *Sejarah Gereja Umum, Perjalanan Gereja dari Masa ke Masa*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014).
- Schaff, Philip. *St. Augustinus's City of God and Christian Doctrine*. (New York: Grand Rapids, MI: Christian Classics Ethereal Library, 1890).
- Saeculum, *History and Society in the Theology of St Augustine*, (Cambridge, 1970).
- Schwiebert, E. G. *Luther and His Times*. (St. Louis: Concordia, 1950).
- Tholuck, A., ed., *Institutio Christianae Religionis*, 2 vols. (Edinburgh, 1874.) 1560 edition French. Torrance, D.W. and Torrance, T. F., ed., *Calvin's Commentaries*, (N.T. Edinburgh and London, 1959).
- Wallace, R. S., *Calvin's Doctrine of the Christian Life*, (Edinburgh, 1959). Walton, R., *Theocracy*, (Toronto, 1967).